



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iiii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Implementasi Kebijakan	11
2.1.1 Definisi.....	11
2.1.2 Perkembangan Studi Implementasi	11
2.1.3 Dua Perspektif Implementasi.....	11
2.1.4 Teori dan Model Implementasi.....	16
2.2 Efektivitas Implementasi Kebijakan	27
2.2.1 Definisi.....	27
2.2.2 Variabel.....	28



2.3	Konsep Delayering dalam Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi ..	30
2.4	Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi....	32
2.5	Tantangan dan Hambatan Implementasi Kebijakan	35
2.6	Penelitian Terdahulu	36
2.7	Kerangka Berpikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Jenis Penelitian	41
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.4	Sumber Data/Informan Penelitian	47
3.5	Teknik Analisis Data	50
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS		53
4.1	Potret Implementasi Kebijakan Pada KemenkumHAM	54
a.	Substansi Kebijakan.....	54
b.	Sumber Daya.....	67
c.	Karakteristik.....	85
d.	Komunikasi	107
e.	Disposisi.....	126
4.2	Tujuan Kebijakan dan Perubahan sebagai Output Implementasi .	147
4.3	Analisis Ambiguitas-Konflik Kebijakan	169
4.4	Efektivitas Implementasi Kebijakan	174
4.5	Tantangan dan Hambatan Efektivitas Implementasi Kebijakan...	182
BAB V PENUTUP		188
5.1	Kesimpulan	188
5.2	Rekomendasi.....	190
DAFTAR PUSTAKA		193
Lampiran I Panduan Wawancara		
Lampiran II Dokumentasi Penelitian		



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penyetaraan Jabatan di Kemenkumham	4
Gambar 2.1 Model Van Meter dan Van Horn	17
Gambar 2.2 Model Grindle	18
Gambar 2.3 Model Edward III	20
Gambar 2.4 Model Mazmanian dan Sabatier	21
Gambar 2.5 Matriks Ambiguity Conflict - Matland	23
Gambar 2.6 Kerangka Berpikir Penelitian	40
Gambar 3.1 Hubungan Analisis dan Pengumpulan Data	52
Gambar 4.1 Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pejabat Yang Disetarakan Per UKE I	3
Tabel 2.1 Matriks Variabel Implementasi Kebijakan.....	29
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	44
Tabel 3.2 Informan Penelitian	49
Tabel 4.1 Matriks Pengolahan Data untuk Variabel Substansi Kebijakan	65
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Kemenkumham Berdasarkan Tingkat Pendidikan	72
Tabel 4.3 Matriks Pengolahan Data untuk Variabel Sumber Daya.....	81
Tabel 4.4 Jumlah UPT Kementerian Hukum dan HAM	89
Tabel 4.5 Matriks Pengolahan Data untuk Variabel Karakteristik	102
Tabel 4.6 Matriks Pengolahan Data untuk Variabel Komunikasi	122
Tabel 4.7 Matriks Pengolahan Data untuk Variabel Disposisi.....	143
Tabel 4.8 Matriks Pengolahan Data terkait Perubahan sebagai Output Kebijakan ..	165
Tabel 4.9 Matriks Hasil Temuan Lapangan dan Analisis.....	174